

Kolaborasi Pemerintah Dan Pelaku Usaha Sulawesi Tengah Untuk Mengembangkan Komoditas Rumput Laut

Andi Mardiana, Andi Salwa Sahnitasari, Iyanti Lahardi, Fahri Afdal

^{1,2,3,4} IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jalan Pone, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Email : andimardianabone@gmail.com andisalwapr111@gmail.com

, iyantilahardi575@gmail.com , fahriafdal26@gmail.com

Abstract. *Central Sulawesi, one of the largest seaweed-producing provinces in Indonesia after South Sulawesi, but only uses seven per cent of its potential cultivation land. Despite its large production, the quality of Central Sulawesi seaweed is low due to a lack of coordination between the government and seaweed entrepreneurs, both in cultivation, post-harvest management, distribution, and marketing. To overcome this problem, development efforts are needed through the cooperation of local governments and business actors. This qualitative research aims to analyse the development of seaweed production quality and yield in Central Sulawesi with a focus on such cooperation. Recommended measures include improving production quality in Morowali and Banggai Laut districts, providing storage and transport, establishing processing industries, and zoning cultivation.*

Keywords: *Central Sulawesi Government, Business Actors, Cooperation, Seaweed*

Abstrak. Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia setelah Sulawesi Selatan, namun hanya menggunakan tujuh persen dari potensi lahan budidayanya yang dimiliki. Meski produksinya besar, kualitas rumput laut Sulawesi Tengah rendah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pengusaha rumput laut, baik dalam budidaya, pengelolaan pasca panen, distribusi, maupun pemasaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pengembangan melalui kerja sama pemerintah daerah dan pelaku usaha. Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis pengembangan kualitas dan hasil produksi rumput laut di Sulawesi Tengah dengan fokus pada kerja sama tersebut. Langkah-langkah yang direkomendasikan termasuk peningkatan kualitas produksi di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Laut, penyediaan tempat penyimpanan dan transportasi, pembangunan industri pengolahan, serta penataan zonasi budidaya.

Kata kunci: Pemerintah Sulawesi Tengah, Pelaku Usaha, Kerja sama, Rumput Laut

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat besar, baik pada sektor kelautan dan perikanan seperti yang terdiri dari beberapa komoditas yaitu tuna, udang, cakalang, kerapu, dan rumput laut. (Mursit et al., 2022) Di antara beberapa komoditas tersebut, rumput laut adalah salah satu di antara komoditas potensial yang dimiliki Indonesia karena didukung oleh besarnya luas laut yakni 3.25 juta km² juga total luas area budidaya rumput laut mencapai 1.110.900 ha. (Khaldun, 2019)

Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki sekitar 555 jenis atau 45 persen jumlah spesies unggul rumput laut di dunia. (Syah, 2021) Selaras dengan ketersediaan lahan budidaya rumput laut, maka Indonesia adalah salah satu produsen komoditas rumput laut terbesar di dunia dan termasuk ke dalam sepuluh negara eksportir rumput laut terbesar di dunia bersama beberapa negara lainnya seperti Jepang, Cina, Chili, Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, Perancis, Irlandia, dan juga Peru. (Firzatullah, 2020) Realisasi volume ekspor rumput laut Indonesia pada Tahun 2016 mencapai 182.237 ton dan nilai ekspor sebesar US\$

Received: 22 November 2023 Accepted: 28 Desember 2023 Published: 29 April 2024

* Andi Mardiana, andimardianabone@gmail.com

124.008.000, sedangkan Cina memiliki volume ekspor sebesar 13.762 Ton dan nilai ekspor US\$ 64.332.000.(Asimu & Hapsari, 2018) Adapun Jepang pada Tahun 2016 memiliki volume ekspor 1.258 Ton dan nilai ekspor sebesar US\$ 19.005.000.(Rompas, 2018)

Berdasarkan pada perbandingan realisasi volume ekspor dan juga nilai ekspor antara Indonesia, Cina, serta Jepang dapat dilihat bahwasanya harga ekspor per-Ton rumput laut Indonesia di pasar global sangat rendah dengan kisaran US\$ 680 per-Ton, dibandingkan dengan Cina yaitu sebesar US\$ 4.675 per-Ton dan Jepang sebesar US\$ 15.107 perTon. (Muhadli, 2020) Rendahnya harga ekspor per-Ton komoditas rumput laut Indonesia di pasar global tersebut dapat disebabkan oleh jenis produk yang diekspor mayoritas adalah bahan baku sebesar 80 persen sedangkan produk olahan pabrik hanya sebesar 20 persen. Selain itu juga, kualitas baik bahan baku maupun produk olahan komoditas rumput laut Indonesia sangat rendah dan minim dari standarisasi.(Adiguna et al., 2022)

Terdapat beberapa provinsi di Indonesia sebagai produsen rumput laut yaitu seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Maluku, Bali, dan beberapa provinsinya lainnya khususnya termasuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah.(Wirotamo et al., 2021) Pada Tahun 2014 hingga Tahun 2016 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada diperingkat kedua sebagai produsen rumput laut yang ada di Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan sumber daya yakni lahan budidayanya yang luas mengingat panjang garis pantai yakni 4.013 Km sebagai potensial areal pengembangan komoditas rumput laut yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah.(Sulmi, 2021)

Namun kenyataannya ketersediaan lahan budidaya untuk rumput laut tersebut, tidak sebanding dengan pemanfaatannya yang baru mencapai tujuh persen, sehingga menyebabkan perlu adanya upaya pemanfaatan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Sulawesi Tengah. Hasil pengamatan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terhambatnya proses produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah dan para pelaku usaha rumput laut sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengembangan rumput laut seperti: 1) kurangnya ketersediaan kebijakan ataupun program yang mendukung produksi rumput laut seperti pemberian bantuan, sosialisasi, dan edukasi pada hasil produksi bahan baku; 2) tidak tersedianya gudang untuk menyimpan hasil panen rumput laut; 3) tidak adanya alat transportasi untuk mendistribusikan hasil produksi; 4) pembangunan infrastruktur seperti dermaga di lokasi budidaya rumput laut.(Edi et al., 2019)

Kendala tersebut menimbulkan dampak terhadap optimalisasi pengembangan komoditas rumput laut dari sisi peningkatan jumlah serta kualitas hasil produksi, namun di sisi

lainnya juga adalah kurangnya industri pengolahan rumput laut lokal.(Asaf et al., 2021) Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya dapat mengolah bahan baku yang telah di produksi agar memiliki nilai tambah sebagai bagian dari proses pengembangan rumput laut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan harga ekspor per-Ton komoditas rumput laut Indonesia di pasar global. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk memanfaatkan peran para pemangku kepentingan, yakni pemerintah Sulawesi Tengah dan pihak-pihak yang berkecimpung di industri rumput laut untuk berupaya meningkatkan daya saing produk rumput laut di Sulawesi Tengah.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengembangan rumput laut, seperti penelitian yang berjudul Budidaya Rumput Laut Dalam Upaya Peningkatan Industrialisasi Perikanan menemukan hasil bahwa Perairan Indonesia yang luasnya mencakup sekitar 70% wilayah nusantara memiliki potensi untuk usaha budidaya laut, termasuk di antaranya yaitu budidaya rumput laut.(Sarita et al., 2021)

Selain itu, ada juga penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Usaha Rumput Laut *Euchema Cottonii* di Kabupaten Bantaeng Studi Kasus di Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa'jukukang mengemukakan bahwa strategi kebijakan dalam pengembangan usaha rumput laut yang mengacu pada rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan program bantuan usaha rumput laut di kabupaten Bantaeng masih kurang nyata, dibuktikan dengan kegagalan koperasi citra mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan dengan penilaian ketujuh indikator (pendapatan, pendidikan, motivasi, kesadaran masyarakat, kreativitas dan kemandirian, pengakuan hak serta program kemitraan) akan berdampak kurang nyata pada pengembangan industri rumput laut.(Tahir & Mundiayah, 2020)

Adapun alternatif strategi pengembangan usaha yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut dapat berupa pengembangan strategi kebijakan antara pemerintah daerah, petani rumput laut dan juga pedagang dengan mengikutsertakan Perguruan Tinggi sebagai fasilitator tenaga ahli.(Ginting et al., 2022) Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini adalah menganalisis permasalahan terkait tidak seimbangya ketersediaan lahan potensi pengembangan rumput laut dengan tingkat pemanfaatannya yang hanya berjumlah sekitar tujuh persen, sehingga menunjukkan bahwa pentingnya ada upaya pemanfaatan untuk meningkatkan produksi rumput laut Sulawesi Tengah dengan memperhatikan koordinasi di antara Pemerintah Sulawesi Tengah dan para pelaku usaha rumput laut.

Penelitian ini akan menganalisis upaya untuk mengembangkan komoditas rumput laut melalui kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha rumput laut dalam menyusun kebijakan

maupun program yang mendukung produksi rumput laut termasuk peningkatan kualitas hasil produksi bahan baku rumput laut di beberapa daerah di Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Laut sebagai produsen rumput laut terbesar yang ada di Sulawesi Tengah, selain itu pentingnya penyediaan tempat penyimpanan hasil produk bahan baku rumput laut serta sarana transportasi untuk mengirimkan juga mendistribusi produk rumput laut, pembangunan industri pengolahan rumput laut baik dalam bentuk UMKM maupun dalam skala besar, serta penataan zonasi untuk budidaya rumput laut.

Terdapat empat jenis rumput laut yang sering dibudidayakan di perairan Indonesia yakni *Eucheuma Cottonii*, *Eucheuma Spinosum*, *Gracilaria Spp*, dan *Sargassum Spp*. Wilayah potensial budidaya rumput laut *Eucheuma Cottoni* dan *Eucheuma Spinosium* terletak di perairan pantai pada beberapa provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan beberapa provinsi lainnya termasuk khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. (Munaeni et al., 2023) Jenis rumput laut *Gracilaria Spp* terletak Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Komoditas Rumput laut yang dibudidayakan di Indonesia merupakan rumput laut yang memiliki potensi cukup besar untuk diperdagangkan di pasar global karena permintaan pasar yang juga besar terhadap jenis rumput laut tersebut. Selain itu, rumput laut jenis *Eucheuma Cottonii* dan *Gracilaria Spp* merupakan jenis rumput laut yang perkembangan budidayanya sangat besar karena sifatnya yang mudah untuk dibudidayakan serta tingginya minat pasar dunia terhadap dua jenis rumput laut tersebut.

Tabel 1.

Daftar Provinsi sebagai Produsen Rumput Laut

Provinsi	Tahun (Ton Basah)	
	2015	2016
Sulawesi Selatan	2.512.432	3.311.322
Sulawesi Tengah	1.362.811	1.296.997
NTT	754.621	890.454
Jawa Timur	700.334	798.220
Nusa Tenggara Barat	543.344	634.032
Sulawesi Tenggara	398.657	406.565
Maluku	256.758	300.445
Kalimantan Timur	243.783	312.035
Sulawesi Utara	103.677	256.670
Bali	112.334	97.565
Lainnya	586.785	609.876
Jumlah	7.575.536	8.914.181

Sumber : (Khaldun, 2019)

Dalam Tabel 1 diatas menunjukkan data mengenai beberapa provinsi di Indonesia sebagai provinsi penghasil rumput laut terbesar. Dari Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa terdapat sepuluh provinsi dengan kategori produsen rumput laut terbesar di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan gabungan provinsi

lainnya. Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satu di antara provinsi sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia pada tahun 2016 ternyata hanya mampu memanfaatkan tujuh persen potensi lahan budidaya yang tersedia.

Dalam proses perkembangan rumput laut di Sulawesi Tengah, penetapan rumput laut sebagai komoditas unggulan strategis perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh kelebihan yang dimilikinya dibanding dengan komoditas lainnya seperti jumlah hasil produksi rumput lautnya yang sangat besar, jika dibandingkan dengan komoditas lain. Berdasarkan besaran dari hasil produksi komoditas rumput laut di Sulawesi Tengah, maka sudah seharusnya usaha budidaya rumput laut dapat dikembangkan melalui kerja sama pemerintah daerah dan pelaku usaha. Untuk pengembangan budidaya komoditas rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah, adapun jenis rumput laut yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah jenis *Eucheuma Cottoni* dan *Gracilaria Spp*. Kedua jenis rumput laut tersebut telah berhasil dibudidayakan di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan persebaran budidaya rumput laut di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Hasil Produksi Rumput Laut Per Kabupaten/Kota (Ton)

Kab/Kota	Tahun	
	2016	
	<i>E. Cottoni</i>	<i>Gracilaria Spp</i>
Banggai Kepulauan	670.134	-
Banggai	325	-
Morowali	383.350	4.904
Poso	929	267
Donggala	3.610	-
Toli-Toli	2.213	-
Buol	766	-
Parigi Moutong	117.276	2.441
Tojo Una-Una	3.400	-
Morowali Utara	21.790	-
Banggai Laut	3.684	81.903
Kota Palu	-	-
Sigi	-	-
Jumlah	1.207.480	89.517

Sumber: (Tombolotutu et al., 2019)

Dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten kecuali Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Produksi rumput laut terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Banggai Kepulauan disusul oleh Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah yang sangat potensial untuk lebih mengembangkan produksi rumput laut, sehingga dapat dijadikan sebagai sentral produksi rumput laut terbesar di Sulawesi Tengah karena didukung dengan besaran tingkat ketersediaan lahan pengolahan rumput laut yang mencapai 12.031 hektar.

Total pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan baru mencapai 10.302 hektar, dengan pencapaian produksi pada Tahun 2016 sebesar 670.134 Ton. Sejalan dengan tingginya kebutuhan akan produk rumput laut, maka diharapkan jumlah petani dan lahan yang digunakan untuk budidaya rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di beberapa kabupaten potensial termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat ditingkatkan.

Rumput laut telah menjadi salah satu komoditas penting yang memiliki potensi besar dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan sektor-sektor lainnya. Sulawesi Tengah, sebagai salah satu produsen utama rumput laut di Indonesia, memegang peranan vital dalam penyediaan komoditas ini. Meskipun demikian, pengembangan optimal dari potensi rumput laut di wilayah ini belum sepenuhnya terwujud. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah menjadi salah satu pendekatan yang dianggap krusial untuk meningkatkan pengembangan komoditas rumput laut secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan budidaya yang ada serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Malaupun Sulawesi Tengah memiliki posisi yang signifikan sebagai salah satu produsen utama rumput laut di Indonesia, hanya sebagian kecil dari potensi lahan budidaya yang tersedia yang telah dimanfaatkan. Bahkan, meski volume produksinya besar, kualitas rumput laut yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini antara produksi yang besar dan kualitas yang rendah adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha, mulai dari tahap budidaya hingga pemasaran produk.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan komoditas rumput laut di Sulawesi Tengah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis strategi serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya meningkatkan kualitas dan hasil produksi rumput laut melalui kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas produksi di daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat produksi, penyediaan infrastruktur penyimpanan dan distribusi, pengembangan industri pengolahan, serta penataan zonasi budidaya diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi rumput laut di Sulawesi Tengah.

Dengan menggali lebih dalam tentang dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam konteks pengembangan komoditas rumput laut, diharapkan penelitian

ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan potensi serta kualitas industri rumput laut di wilayah Sulawesi Tengah.

KAJIAN TEORITIS

Kajian Pustaka Tentang Pemerintah

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra Pemerintah (government) ditinjau dari Pengertian the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.(Dimara et al., 2018) Dalam bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah daerah, kota dan negara. Pemerintah juga diartikan sebagai the governing body of a nation, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu Pemerintah dalam arti luas yaitu semua kekuasaan yang ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya mendapatkan satu kekuasaan yaitu segi eksekutif.

Secara etimologi, Inu Kencana Safiie menjelaskan bahwa pemerintah dapat di artikan sebagai berikut:(Syafiie, 2022)

- 1) Pemerintahan berarti melakukan tugas memberi perintah, dan ini berarti ada dua prinsip: siapa yang memerintah mempunyai wewenang, dan siapa yang diperintah harus patuh.
- 2) Setelah di tambah awalan “Pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan yakni memerintah.
- 3) Setelah ditambal lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti pembuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah adalah suatu kekuasaan yang bekerja pada rakyat untuk mencapai tujuan pemerintahan, sedangkan proses kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut disebut pemerintahan, dan ruang lingkup kekuasaan pemerintah itu berasal dari rakyat; dalam melaksanakan segala kegiatan nasional, seluruh pemerintah wajib menyelaraskan dengan kehendak rakyat, karena yang menjadi penggerak kehidupan dan jiwa bangsa adalah rakyat.(Lestari & Djanggih, 2019)

Menurut Taliziduhu Ndraha, Pemerintahan adalah suatu organisasi atau otoritas yang mempunyai wewenang dan tugas dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik agar semua pihak yang terkait dengan pemerintah dapat menikmati pelayanan publik dan memenuhi harapan yang diamanatkan.(Nurdin, 2019) Dalam hubungan sah (legal) dalam Negara Indonesia semua berhak menerima pelayanan sipil tertentu dan pemerintah wajib untuk melayaninya.

Berdasarkan beberapa definisi pemerintah yang dikemukakan dari berbagai ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah adalah badan atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, peraturan, dan undang-undang di bidang tertentu.

Kajian Pustaka Tentang Tugas Pokok Pemerintah

Fungsi utama pemerintahan ada lima yaitu, yang pertama adalah menyediakan layanan. Fungsi pemerintah yang berdasarkan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada rakyat. Yang kedua fungsi pengaturan, fungsi pengaturan berhubungan langsung dengan pembuatan peraturan. Ketiga adalah fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berhubungan dengan keterl pemerintah di dalam proses pelaksanaan kegiatan ekonomi. Keempat, yaitu fungsi perwakilan yakni fungsi yang mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Yang kelima adalah fungsi koordinasi yaitu fungsi yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam mengkoordinasi perencanaan, investasi yang masuk dan tata guna penggunaan lahan.(Hardiyansyah, 2018)

Menurut Blakely, adapun peran pemerintah sebagai berikut: (Yohanes & Patriani, 2022)

1. Pemerintah sebagai interpreneur (wirausaha)

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan usaha yang mengarah pada pembangunan daerah. Pemerintah suatu daerah dapat secara efektif memanfaatkan kekayaan alam daerah tersebut untuk keperluan bisnis. Produk alam di suatu wilayah tertentu mungkin dikelola oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan lingkungan lainnya. Ini juga dapat digunakan untuk alasan perencanaan pembangunan atau tujuan ekonomi lainnya. Hal ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian sekitar. Pada masa Orde Baru, semua pemerintah daerah berupaya menarik investor ke daerahnya guna membangun infrastruktur yang dapat mengembangkan daerahnya.

Menarik minat investor untuk berkunjung ke kawasan tersebut bukan perkara mudah. Beberapa daerah sudah menggunakan berbagai cara untuk menarik investor namun belum mampu menarik investor ke daerahnya. Namun di sisi lain, beberapa daerah mengalami kekurangan lahan sehingga banyak investor yang berminat. Peran pemerintah daerah sebagai wirausaha adalah pemerintah daerah dapat memajukan usahanya dengan mengelola usaha kecil dan menengah.

Kebijakan bagi usaha kecil adalah tentang memberikan dukungan dan pelatihan kepada masing-masing perusahaan untuk meningkatkan bisnis mereka. Jika beberapa

pengusaha kekurangan modal, pemerintah dapat membantu dengan memberikan pinjaman dan hibah kepada pengusaha lokal. Siapapun yang menjalankan usaha kecil diharapkan dapat memanfaatkan hibah dan pinjaman agar mereka dapat meningkatkan, mengembangkan dan terus mengembangkan usahanya.

Sebagai entrepreneur, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendorong usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah dan negaranya. Kehadiran entrepreneur atau wirausaha di pedesaan memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan memberikan mereka keberanian mengambil risiko dan berbisnis.

2. Pemerintah sebagai koordinator

Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan dengan bertindak sebagai koordinator regional dan mempunyai suara dalam strategi pembangunan daerah. Peran pembangunan pertanian atau rencana pembangunan ekonomi daerah yang dikembangkan di wilayah tertentu mencerminkan potensi rencana dan kesepakatan yang disusun dengan baik menjadi pendekatan yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator, bila di tinjau dari tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, kepala Administrasi kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan pelayanan negara di daerah atau kabupaten. Khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menggunakan kekuasaan dan kapasitasnya untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan inisiatif di daerahnya dan berperan sebagai koordinator untuk membawa perubahan dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah harus berkomunikasi dengan baik dengan pihak berwenang dan masyarakat di daerahnya agar mereka mengetahui secara pasti keadaan daerahnya, bagaimana pemerintah dapat membuat perencanaan yang tepat, dan mempunyai pengetahuan langsung mengenai situasi pembangunan. Bersosialisasi ke daerah secara langsung menjadi langkah tepat untuk mendapatkan data dan informasi dari masyarakat sendiri.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah dapat dengan baik dan lancar memajukan pembangunan dengan memperhatikan perilaku masyarakat di daerahnya. Peran ini dapat mencakup penyederhanaan proses pembangunan, peningkatan prosedur perencanaan, penetapan peraturan, dan lain-lain.

Peranan pemerintah sebagai fasilitator, menurut Riadi dan Bratakusuma. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,

pemerintah, dan lingkungan hidup pada suatu wilayah atau wilayah tertentu. Peran pemerintah daerah dalam mendorong program perencanaan pembangunan daerah yang terpadu harus mencakup partisipasi masyarakat, yang biasa disebut perencanaan bottom-up, atau keterlibatan langsung seluruh masyarakat.

4. Pemerintah Sebagai Stimulator

Selain itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan usaha lebih lanjut dengan mempengaruhi perkembangan masing-masing usaha, menarik investor ke daerah, lebih mempromosikan usaha, dan mengadopsi strategi yang mendorong pembangunan di daerah. Sebagai stimulator, pemerintah harus mendorong warganya untuk terus berkarya agar mencapai kemakmuran dan kejayaan.

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah Manatuto, memberikan bantuan kepada dunia luar melalui pameran dan berbagai media massa dan elektronik, serta mempromosikan produk lokal. Ketika pemerintah terus berupaya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memakmurkan kehidupan masyarakat, pemerintah harus selalu memperhatikan pihak-pihak yang menjalankan usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berpegang teguh pada kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan sejak awal dan terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah. Pemahaman ini diteorikan oleh para peneliti dari studi lapangannya bahwa pemerintah perlu lebih memotivasi pengusaha lokal untuk meningkatkan usahanya, dan pemerintah juga berupaya menarik investasi dari luar daerah dan luar negeri. Untuk pengembangan lebih lanjut semua perusahaan. Perekonomian lokal dapat lebih berkembang dan mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari sektor swasta.

Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dijelaskan dari ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan suatu negara dengan fungsinya sebagai pembangunan, pemberdayaan, pelayan dan pengatur bagi masyarakat.

Kajian Pustaka Tentang Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang perseorangan, badan hukum, perseroan terbatas, perseroan gabungan, atau bukan badan hukum yang melakukan transaksi produksi, distribusi, penjualan, dan penjualan serta mempengaruhi perekonomian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Aisha Mutiara, 2021) Sedangkan Menurut pasal 1 butir 3 mengatakan : “Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi”.(Suwandono & Dajaan, 2020)

Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tentang ruang lingkup yang terlibat pada pelaku usaha adalah sebagai berikut :(Rizkia & Rahmawati, 2021)

- 1) Investor, yaitu seorang pelaku usaha dimana posisinya sebagai penyedia dana dalam arti menyuntikan dana kepada suatu perusahaan yang membutuhkan dukungan agar dapat beroperasi dengan lancar maupun berkembang lebih besar.
- 2) Produsen, yaitu seorang pelaku usaha yang mendirikan suatu pabrik dan memproduksi suatu barang yang disebut sebagai produk kemudian akan didistribusikan dan dijual ke pasaran.
- 3) Distributor, yaitu seorang pelaku usaha yang berprofesi perantara dalam menyalurkan produk yang akan dijual dari pelaku usaha utama atau yang disebut sebagai produsen pertama kepada masyarakat luas.

Pelaku usaha tidak hanya memikirkan tentang keuntungan dan kelancaran usahanya, mereka juga harus memenuhi kewajibannya, yaitu tanggung jawabnya terhadap konsumen akhir barang dan jasanya.(Lestari, 2021) Namun, dalam beberapa kasus, kewajiban ini dapat diabaikan dan konsumen dapat kehilangan hak untuk menggunakan barang dan jasa tersebut. Agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya secara konsisten, maka harus ditetapkan terlebih dahulu peraturan mengenai pentingnya tanggung jawab pelaku ekonomi, yaitu produsen, pedagang, pengecer, dan lain-lain, terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam penggunaan produk dan jasa.

Terdapat sebuah istilah hukum yaitu Tanggung Jawab Produk dikutip dari terjemahan bahas Inggris Product Liability yang berarti suatu perilaku baik dari produsen, distributor, reseller dan lain-lain bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen bila terjadi kecelakaan atau cedera saat menggunakan barang dan jasa tersebut.(Rahmawati et al., 2018) Untuk penjelasan lebih lanjut, tanggung jawab produk bagi para produsen, distributor, reseller, dan sales adalah strict liability yang berarti tanggung jawab mutlak dimana sudah dari dasarnya atau secara logikanya, bila konsumen mengalami kerugian yang dapat membahayakan nyawa konsumen saat menggunakan produk tersebut maka secara otomatis para pelaku usaha wajib serta harus melakukan pertanggung jawaban terhadap konsumen itu.

Kajian Pustaka Tentang Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat pesisir dengan cara mengelola pengembangan dan

pemanenan rumput laut. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengembangan budidaya rumput laut merupakan salah satu alternatif untuk memperkuat masyarakat pesisir. Produk berkualitas tinggi dan aplikasinya sangat beragam, tersedia lahan yang luas untuk budidaya alga dan tersedia teknologi tepat guna.(Damayanti et al., 2021) Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kementerian kelautan dan perikanan agar dapat dikembangkan dalam mendukung perekonomian rakyat Indonesia.(Putra et al., 2022)

Rumput laut dalam istilah asing disebut juga “seaweed” yang merupakan salah satu anggota tanaman dan juga merupakan tumbuhan berklorofil.(Sufa, 2023) Kajian terhadap tanaman rumput laut ini dibahas dalam disiplin ilmu yang disebut Algologi (algor=dingin dan logo=ilmu) atau phycology, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tanaman alga. Rumput laut memiliki banyak jenis dan bentuk koloni, hidupnya yang banyak di temukan pada daerah perairan yang dangkal, dan hidup pada daerah yang berpasir, memiliki banyak karang, baik berbentuk secara alami atau buatan (artificial).(Kasanah et al., 2021)

Alga atau rumput laut ini mempunyai bentuk bermacam- macam, seperti benang atau tumbuhan tinggi. (Subrata & Sumaryani, 2021)Ciri utamanya, tidak mempunyai alat berupa akar, batang dan daun yang dinding selnya dilapisi lender. Alga bersifat autorof, adalah alga yang bisa hidup sendiri tanpa adanya sinar matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis. Salah satu jenis yang potensial di kembangkan adalah jenis agrofita yaitu Gracilaria . Menurut H. indriani dan E. Suminarsih, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya perairan pantai yaitu:(Kasnir et al., 2023)

1. Pemilihan lokasi

Ada beberapa hal yang harus di perhaikan dalam pemilihan lokasi untuk melakukan budidaya rumput laut adalah perairan cukup tenang, terlindungi dari pengaruh angin dan ombak,tersedianya rumput alami setempat (indicator), kedalaman maksimal sekitar 60 cm pada saat surut terendah dan tidak lebih sekitar 210 cm pada saat pasang tertinggi. Selain itu, juga harus di dukung dasar perairan (tipe dan sifat substrat) yang bdi gunakan, dasar perairan sedikit berlumpur atau berpasir, perairan subur atau kurang subur. Dan masih banyak hal yang harus di perhatikan saat pemilihan lokasi yaitu kualitas air , akses tenaga kerja, perizinan, dan sebagainya.

2. Melakukan uji penanaman

Setelah menemukan lokasi yang dianggap sudah layak, perlu di lakukan uji penanaman untuk mengetahui apakah daerah tersebut memberikan pertumbuhan yang baik atau tidak.

Pengujian di lakukan dengan metode tali dan metode jarring. Pada metode tali di gunakan tali monofilament atau polyethylene yang diikatkan pada 2 tiang pancang yang di pasang dengan jarak sekitar 12 m. Sedangkan pada metode jarring dapat menggunakan jarring monofilament atau polyethylene dengan ukuran 5 m x 2,5 m yang diikatkan pada tiang pancang.

3. Menyiapkan Areal Budidaya

Persiapan atau areal budidaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pembersihan pada dasar perairan yang akan di jadikan sebagai lokasi budidaya dari rumput laut dari tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut.
- b. Bersihkan tempat yang akan di jadikan sebagai lokasi untuk budidaya rumput laut dari hewan atau predator yang dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut.
- c. Menyiapkan lokasi yang bersih untuk bisa di jadikan penampungan, dapat terbuat dari jaring yan terbuat dari rotan, bambu ukurannya bervariasi 2 m x 2 m x 1,5 m atau 2 m x 2 m x 1.5 – 1,7 m. atau tempat yang terbuat dari kerangka besi.

4. Pemilihan Metode Budidaya yang dapat di pergunakan

Pemilihan metode budidaya rumput laut yang akan di pergunakan di lapangan yaitu ada 3 macam metode yang akan di pake yaitu metode dasar, metode lepas dasar, dan metode apung.

- a. Metode dasar yaitu metode pertama yang akan digunakan dalam budidaya rumput laut itu menggunakan benih yang sebelumnya sudah diikat terlebih dahulu, lalu kemudian ditebarkan ke dasar perairan, atau sebelum ditebarkan benih diikat dengan batu karang, metode ini terbagi atas 2 yaitu : metode sebaran dan juga metode budidaya dasar laut.
- b. Metode lepas dasar (off bottom method) dilakukan dengan mengingatkan benih rumput laut (yang diikat dengan tali rapia) pada rentangan tali nilon atau jaring diatas dasar perairan dengan menggunakan pancang-pancang kayu, metode ini terbagi atas : metode tunggal lepas dasar (off – bottom monoclone method), dan metode jaring lepas dasar berbentuk tabung (off - bottom – tabular – net – method).
- c. Metode apung (floathing method) merupakan rekayasa bentuk dari metode lepas dasar pada metode ini tidak lagi digunakan kain pancang tetapi diganti dengan pelampung. Metode ini terbagi menjadi : metode tali tunggal apung (floathing – monoclone method) dan metode jaring apung (floathing net method)

5. Penyediaan Bibit

Setelah dipilih metode apa yang akan digunakan dalam pembudidayaan yang akan dilakukan, maka selanjutnya yaitu menyediakan bibi, lalu bibit di ambil langsung dari tempat pembibitan, ada beberapa metode yang akan digunakan dalam pengumpulan benih yaitu

- a. metode penyebaran secara spontan : potongan potongan (fragmen tetrasporotphyte) di letakkan pada jaring jaring bersih (seed nest) dan dapat pula di letakkan pada potongan-potongan batu di dalam tangki pengumpul yang telah di isi air laut, setelah itu, di biarkan tetrasporamenyebar secara spontan.
- b. Metode kering tetrasporotphyte di keringkan di bawah matahari selama tiga jam, kemudian di tempatkan pada jaring-jaring yang bersih.
- c. Metode kejutan Osmotik:tetrasporotphyte di rendam dalam air laut berkonsentrasi 1,030 g/cm selama 25 menit, kemudian di rendam ke dalam air laut berkonsentrasi normal sambil di aduk dan akhirnya suspensi spora dapat di peroleh.

6. Penanaman bibit

Bibit yang akan ditanam adalah bibit yang masih muda dan berasal dari ujung talus tersebut, saat yang baik untuk menebar maupun penanaman benih adalah pada saat cuaca teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah pagi hari dan sore hari menjelang malam.

7. Perawatan selama pemeliharaan.

Satu minggu kemudian setelah bibit di tanam maka harus dipelihara dengan baik dan memberikan perawatan yang baik, member pengawasan , bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan agar bibit yang di tanam bisa terjaga dengan baik dan bersih dari kotoran atau hewan yang akan muncul untuk mengganggu perkembangan rumput laut..Bila kondisi perairan kurang baik, seperti ombak yang keras, angin, serta suasana perairan yang banyak di pengaruhi kondisi musim (hujan atau kemarau), perlu pengawasan 2 atau 3 kali sehari.

8. Pemanenan

Pemanenan dapat dilakukan bila rumput laut telah mencapai bobot tertentu, yakni sekitar 4 kali bobot awal (waktu pemeliharaan 1, 5 – 4 bulan) cepat tidaknya pemanenan bergantung metode dan perawatan yang dilakukan setelah bibit ditanam.

9. Pengeringan

Hasil Panen Penanganan pasca pemanenan, termasuk pengeringan yang tepat sangat perlu, mengingat pengaruh langsungnya terhadap mutu dan harga penjualan di pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif karena penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan komoditas rumput laut di Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah khususnya kabupaten-kabupaten yang merupakan wilayah penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Data penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa jurnal pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni, buku, dokumen, maupun hasil penelitian lain dan berbagai rujukan lainnya (Assyakurrohim et al., 2023) Studi pustaka dapat digambarkan dengan menganalisis hasil berbagai buku referensi dan penelitian serupa sebelumnya, yang membantu dalam memperoleh landasan teoritis untuk masalah yang sedang diteliti. (Rukin, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pengembangan produk rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan komitmen kerja sama antara Pemerintah Sulawesi Tengah dan para pemangku kepentingan perekonomian, yakni pelaku usaha rumput laut. Komitmen kerjasama tersebut harus dilaksanakan dalam program kerja sama yang sistematis dan berkelanjutan. Ketidakhadiran kerja sama di antara para pelaku ekonomi tersebut, menjadikan dasar bahwa optimalisasi terhadap pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah masih sangat kurang.

Permasalahan ataupun kendala dalam pengembangan rumput laut Sulawesi Tengah ini disebabkan oleh beberapa faktor contohnya tidak adanya upaya dalam peningkatan kualitas hasil produksi rumput laut, tidak adanya upaya dalam membangun gudang penyimpanan dan alat transportasi untuk mengantarkan produk rumput laut Sulawesi Tengah agar dapat terdistribusi, tidak adanya upaya dalam menyusun program pembangunan industri baik dalam bentuk UMKM maupun skala besar, serta tidak adanya upaya dalam program penataan zonasi budidaya rumput laut sehingga perlu dilakukan adanya kerja sama di antara Pemerintah Sulawesi Tengah dan para pelaku usaha rumput laut. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan berikut ini.

Program Peningkatan Kualitas Hasil Produksi Rumput Laut

Pemerintah Sulawesi Tengah dan pelaku usaha rumput laut dapat melakukan kerja sama yaitu melakukan peningkatan kualitas hasil produksi rumput laut Sulawesi Tengah. Program ini dapat dikembangkan dalam bentuk konsultasi, edukasi dan dukungan kepada

masyarakat lokal khususnya petani rumput laut untuk mengembangkan metode budidaya rumput laut yang lebih modern dibandingkan dengan metode tradisional sebelumnya. Di mana cara budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani rumput laut tidak mengikuti prosedur baku mulai dari teknik budidaya hingga proses pemanenan dan pasca panen sehingga menyebabkan beberapa kendala dalam proses budidaya rumput laut.

Kualitas rumput laut yang buruk juga terlihat pada proses pasca panen, dimana proses pengeringan tidak memperhitungkan lokasi pengeringan atau kondisi setempat, sehingga berdampak pada rumput laut yang terkontaminasi dengan sampah. Produk rumput laut sangat dipengaruhi oleh kualitas rumput laut yang digunakan sebagai bahan baku rumput laut yang dihasilkan maupun produk olahan rumput laut, sehingga dalam pengembangan rumput laut sebagai bahan baku rumput laut perlu diperhatikan kadar air, pencemaran, dan lain-lain yang ada Dan juga warna dari rumput laut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil produksi rumput laut Sulawesi Tengah bentuk kerja sama yang dapat diimplementasikan adalah memberikan peran kepada Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai aktor government agar dapat membentuk program sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada para petani rumput laut untuk dapat mengembangkan metode budidaya dengan teknik terbaru seperti penggunaan pupuk, penggunaan mesin pemanen, penggunaan teknologi pengering, serta teknik pembenihan. Selain itu peran para pelaku usaha rumput laut yaitu dalam mendukung hasil produksi rumput laut dengan menyediakan bibit rumput laut yang lebih baik dan berkualitas juga membantu petani memasarkan produknya secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat memaksimalkan kualitas hasil produksi rumput lautnya.

Program Penyediaan Gudang dan Sarana Transportasi

Ketika hasil panen rumput laut telah tersedia, hasil produksi rumput laut tersebut selanjutnya akan segera didistribusikan ke pasar lokal di wilayah Sulawesi Tengah atau ke pasar nasional dan ekspor. Akan tetapi, kendala terhadap produksi yang melimpah adalah tidak tersedianya tempat penyimpanan dan alat transportasi pengangkutan rumput laut berupa kapal untuk mendistribusikan hasil panen rumput laut. Ketersediaan gudang serta alat transportasi untuk menyimpan dan mendistribusikan rumput laut adalah faktor yang penting dalam mengembangkan komoditas rumput laut Sulawesi Tengah.

Disebabkan oleh tidak adanya gudang dan sarana transportasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan biaya logistik dari area penghasil rumput laut ke gudang dan pabrik pengolahan, sehingga berdampak akan mempengaruhi tinggi nya harga bahan baku rumput. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat pentingnya peran Pemerintah

Sulawesi Tengah melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha rumput laut untuk menyusun kebijakan yang tepat berupa penyediaan gudang dan sarana transportasi dalam pengembangan produksi rumput laut dengan cara pengurangan biaya logistik.

Program Pembangunan Industri baik UMKM maupun Skala Besar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pemerintah kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Sulawesi Tengah perlu untuk memikirkan dan menyusun kebijakan berupa pembangunan industri bagi pengolahan rumput laut agar hasil produksi rumput laut Sulawesi Tengah dapat diolah terlebih dahulu menjadi berbagai jenis produk olahan sebelum kemudian didistribusikan ataupun dipasarkan sehingga mendapatkan nilai tambah baik di pasar nasional maupun global. Kondisi perdagangan komoditas rumput laut Indonesia saat ini, masihlah didominasi oleh bahan baku rumput laut sebesar 80 persen lebih banyak dibandingkan dengan produk olahan yang hanya sekitar 20 persen saja.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya industri pengolahan rumput laut tersebut, dimana hanya 20% saja bahan baku rumput laut yang dihasilkan mampu diolah di dalam negeri, dan sekitar 80% sisanya diekspor. Bersama dengan para pelaku usaha rumput laut, Pemerintah Sulawesi Tengah bisa bekerja sama dalam bentuk program kerja sama berupa pembangunan industri pengolahan rumput laut baik dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun dalam skala yang lebih besar agar hasil produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah dapat diolah terlebih dahulu sebelum kemudian didistribusikan. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan dukungan berupa penguatan dalam rangka memberikan bantuan seperti pengembangan sektor usaha masyarakat melalui berbagai bantuan pendanaan di bidang usaha rumput laut dalam upaya mengembangkan pelaku usaha rumput laut Sulawesi Tengah.

Program Penataan Zonasi Budidaya Rumput Laut

Penataan zonasi sangat penting dalam mendukung langkah pengembangan budidaya komoditas rumput laut di Sulawesi Tengah khususnya di beberapa kabupaten potensial pengembangan rumput laut. Hal ini disebabkan karena untuk menghindari adanya konflik, yang akan berdampak buruk terhadap upaya pengembangan rumput laut Sulawesi Tengah. Pemerintah Sulawesi Tengah perlu mempertimbangkan adanya penyusunan program penataan zonasi budidaya rumput laut bersama dengan para pelaku usaha rumput laut untuk bekerja sama agar pengembangan rumput laut dapat berjalan dengan maksimal.

Apabila penataan zonasi budidaya rumput laut tidak diupayakan, Kegagalan dalam mematuhi peraturan zonasi mengenai budidaya rumput laut akan berdampak negatif terhadap perkembangan budidaya rumput laut, karena akan mempersulit proses pemeliharaan budidaya

rumpun laut tersebut seperti sengketa lahan untuk budidaya rumput laut dan pengembangan wisata atau pembangunan dermaga. Para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan bernegosiasi untuk mengembangkan peraturan zonasi budidaya rumput laut yang sejalan dengan upaya pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya yang perlu untuk dilakukan dalam mengembangkan produk rumput laut di Sulawesi Tengah adalah dengan menjalin kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaku usaha rumput laut, seperti :

- 1) Peningkatan kualitas produksi bahan baku rumput laut di beberapa daerah seperti di Provinsi Morowali dan Banggai yang merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar;
- 2) Peningkatan kualitas produksi bahan baku rumput laut di beberapa daerah seperti provinsi Morowali dan Banggai yang merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar;
- 3) Pembangunan industri pengolahan rumput laut, baik dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun dalam skala yang besar; serta
- 4) Penataan zonasi untuk budidaya komoditas rumput laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan dan penerbitan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang dengan sabar membimbing kami mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami cara membuat jurnal. Oleh karenanya penulis meminta maaf bila dalam penulisan jurnal ini terdapat kesalahan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adiguna, A. D., Krisnamurthi, B., & Erwidodo, E. (2022). Analisis Daya Saing Ekspor Rumput Laut Olahan Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 31–39.
- Aisha Mutiara, S. (2021). *Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Asaf, R., Athirah, A., & Paena, M. (2021). Optimalisasi Pengembangan Usaha Budi Daya Rumput Laut (*Kappaphycus Alvarezii*) Di Perairan Teluk Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*,

16(1), 39–50.

- Asimu, M. F. A., & Hapsari, R. D. (2018). Pemberdayaan Petani Rumput Laut Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. *J-3p (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 31–42.
- Assyakurrohimi, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Damayanti, I. F., Purwadinata, S., & Fitriyani, I. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Rumput Laut Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 301–312.
- Dimara, S. G., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2018). Peranan Pemerintah Distrik Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Edi, S., Siregar, H., Baga, L. M., & Suroso, A. I. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan Rantai Pasok Rumput Laut Indonesia Berbasis Sistem Resi Gudang. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 13(2), 281–308.
- Firzatullah, N. (2020). *Daya Saing Rumput Laut Indonesia Di Pasar Internasional*. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Ginting, T. O. B., Saripurna, D., & Pranata, A. (2022). Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Abortus Menggunakan Metode Certainty Factor. *Jurnal Cyber Tech*, 2(10).
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kasanah, N., Ulfah, M., Nugroho, A., & Wijnana, A. P. A. (2021). *Rumput Laut Indonesia: Keanekaragaman Rumput Laut Nusa Tenggara Timur*. Ugm Press.
- Kasnir, M., Aminuddin, A., & Nisaa, K. (2023). The Effect Of Distance On Seaweed Growth And Production Using The Strap Rope Method In Pond. *Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan*, 16(2), 39–47.
- Khaldun, R. I. (2019). Pengembangan Komoditas Rumput Laut Melalui Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Di Sulawesi Tengah. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 21–27.
- Lestari, R. B. D. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pemutih Badan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen The Protection Of Law For Illegal Body Lotion Consumer According By The Consumer Protection Of Law*. Universitas Bhayangkara.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163.
- Muhadli, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut Desa Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1025–1032.
- Munaeni, W., Lesmana, D., Irawan, H., Hamka, M. S., & Nafsiyah, I. (2023). *Potensi Budidaya Dan Olahan Rumput Laut Di Indonesia*. Tohar Media.
- Mursit, A., Wahyono, A., & Setiawan, Y. (2022). Strategi Peningkatan Ekspor Produk Kelautan Dan Perikanan Ke Pasar Eropa. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 9–24.

- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Media Sahabat Cendekia.
- Putra, A., Finasthi, D., Putri, S. Y. A., & Aini, S. (2022). Komoditas Akuakultur Ekonomis Penting Di Indonesia. *Warta Iktiologi*, 6(3), 23–28.
- Rahmawayi, I. N., Sh, M. H., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Mediapressindo.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.
- Rompas, J. D. W. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Produksi Di Pulau Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(61).
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sarita, I. D. A. A. D., Subrata, I. M., Sumaryani, N. P., & Rai, I. G. A. (2021). Identifikasi Jenis Rumput Laut Yang Terdapat Pada Ekosistem Alami Perairan Nusa Pedida. *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains*, 10(1), 141–154.
- Subrata, I., & Sumaryani, N. P. (2021). Identifikasi Jenis Rumput Laut Yang Terdapat Pada Ekosistem Alami Perairan Nusa Penida. *Emasains*, 10(1), 141–154.
- Sufa, B. (2023). *Industri Rumput Laut*. Penerbit Nem.
- Sulmi, S. (2021). Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Produksi Petani Rumput Laut Di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. *Agrotekbis: E-Jurnal Ilmu Pertanian*, 9(4), 979–985.
- Suwandono, A., & Dajaan, S. S. (2020). Penyelenggaraan Umrah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Pma No. 8 Tahun 2018. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 170–200.
- Syafie, I. K. (2022). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syah, A. F. (2021). Management Of Marine And Fisheries Resources: Cipta Kerja Act And Islamic Perspective. *Islamic Research*, 4(2), 63–70.
- Tahir, R., & Mundiya, A. I. (2020). Analisis Hubungan Rantai Pasok Terhadap Kualitas Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Galung Tropika*, 9(1), 19–30.
- Tombolotutu, A. D., Khaldun, R. I., Palampanga, A. M., Djirimu, M. A., & Tenge, E. (2019). Trade Liberalization And Export Competitiveness: A Case Study On Indonesian Seaweed In The Global Market. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 270(1), 12056.
- Wirotamo, A., Lamusa, A., & Nurdin, M. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi Usahatani Rumput Laut Di Desa Peningkatan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Agrotekbis: E-Jurnal Ilmu Pertanian*, 9(3), 532–538.
- Yohanes, H. U. A. Y., & Patriani, I. (2022). Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom Di Kabupaten Kapuas Hulu. *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(4).